DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fauzi Yudistira, 2010". Implementasi Kebijakan Publik". http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik

Edward III, George C. (edited). 1984. Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England. halaman 9-10

Adam, 2000. tentang *Dampak Negatif dari penduduk Desa* Kusmanto, Heri. 2007. *Desa Tertekan Kekuasaan*. Medan: Bitra Indonesia.

Mahmud, Amir. 2013. Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi

Mona, 2015. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*tentang DESA dan Peraturan Pelaksanaanya. Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Mahardika.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Pengaturan Desa Oleh good Governance Desa*). Bandung: CV. MandarMaju.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa, (Diakses pada tanggal 25 juni 2013).

Jurnal:

Gusti Predi Natakusuma. 2015. *Partisispasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Raya.* Volume 4, Nomor 4. di akses pada Desember 2015.

Tifani Ardilah, Moehammad Makmur, Imam Hanafi. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*. Volume 2, Nomor 1. diakses pada Maret 2016

Theofilus Kuhon. *Partsipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa*Tonsealama Kecamatan Tondano Utara. diakses pada 25 februari 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa dan*Peraturan Pelaksanaannya.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, menurut Qanun Kabupaten Aceh

Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang *Pemerintahan Kampung*

(Bupati Aceh Tamiang).

AU No. 32 Tahun 2004 *Desa mempunyai wewenang mengatur dan memgurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul*

dan adat

istiadatnya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Internet:

http://dompa.desa.id/454/KTPS/XXI/2016. Tahapan-tahapanPemilihan Kepala_Desa Serentak. di unduh 19 Januari 2017.

http://Abuvanzablog.WWordpress.com site/Panitia Pemilihan Kepala Desa. di unduh tanggal 16 maret 2017.

http://politik-kumpulanundang-undang.blogspot.com/2011/14/Demokrasi Desa.

diunduh tanggal 20 februari 2016.

http://Wki.pattiro.org/indek.php.2016/14/Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa.diunduh tanggal 30 april 2017.

Wawancara Narasumber

Wawancara dengan Bapak Kepala deesa Balung Lor tanggal 3 maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Imam Syahrowi tanggal 5 dan 7 maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Ali Mahfud tanggal 3, 5 dan 7 maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Muliyono tanggal 7 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Holis tanggal 5 maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Yazid tanggal 7 maret 2020.

